



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Jalan Pertanian , Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Telepon (0549) 2022061, Laman : bpkad.kutaitimurkab.go.id

Pos-el : sekretariat@bpkad.kutaitimurkab.go.id

KATA PENGANTAR

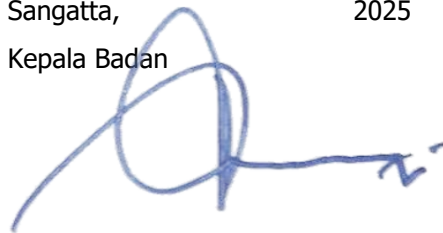
Berkat Rahmat dan Hidayah Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Timur dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Renstra tersebut dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur. Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Proses penyusunan dilakukan secara terkoordinasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait, guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar perangkat daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini masih terdapat kekurangan dan perlu masukan-masukan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Renstra ini.

Semoga Penyusunan Renstra ini memberikan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Kutai Timur pada umumnya dan juga pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sangatta, 2025
Kepala Badan



Ade Achmad Yulkafilah, S.T., M.M.

Pembina TK I / IVb

NIP. 19750717 200701 1 014

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
	2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur	7
	a Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur	7
	b Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14
	c Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	27
	3.1 Tujuan dan Sasaran	28
	3.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan	30
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	32
	3.1 Rencana Program dan Kegiatan	32
	3.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah Dokumen Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur disusun mempedomani Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur 2025-2029. Sesuai dengan amanat Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan Pembangunan. Selain hal tersebut, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap OPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Dalam penyusunan rencana strategis organisasi perangkat daerah, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Kebijakan ini mengatur bahwa RPJMD pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah kemudian harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra OPD. Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang tertuang dalam Renstra OPD disusun dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pencapaian Sasaran Program yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Perumusan Rancangan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2025-2029 secara pokok didasarkan pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2025-2029, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Perangkat Daerah (PD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilan perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan kebijakan organisasi yang diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJMD. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk kewajiban penyusunan Rencana Strategis (Renstra) oleh Perangkat Daerah. Renstra merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah dalam jangka waktu lima tahun.

Di dalam ketentuan lainnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), yang memuat kebijakan program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra OPD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD. Visi, misi, tujuan strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu OPD Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunannya, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
23. Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

- 24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 Nomor 06);
- 25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- 26. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 35 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Kab. Kutai Timur tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2025 tambahan Lembaran Daerah Nomor 232, Nomor Register Peraturan Daerah:64.07/30/1/2025. Halaman 9.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk kurun waktu Tahun 2025-2029 mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Serta penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kutai Timur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu :

“Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing”

- ❖ Adapun tujuannya yaitu :
 - a) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kutai Timur.
 - b) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - c) Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar lebih terarah, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d) Sebagai pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2025-2029;
 - e) Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahunan dan Akhir Masa Jabatan;

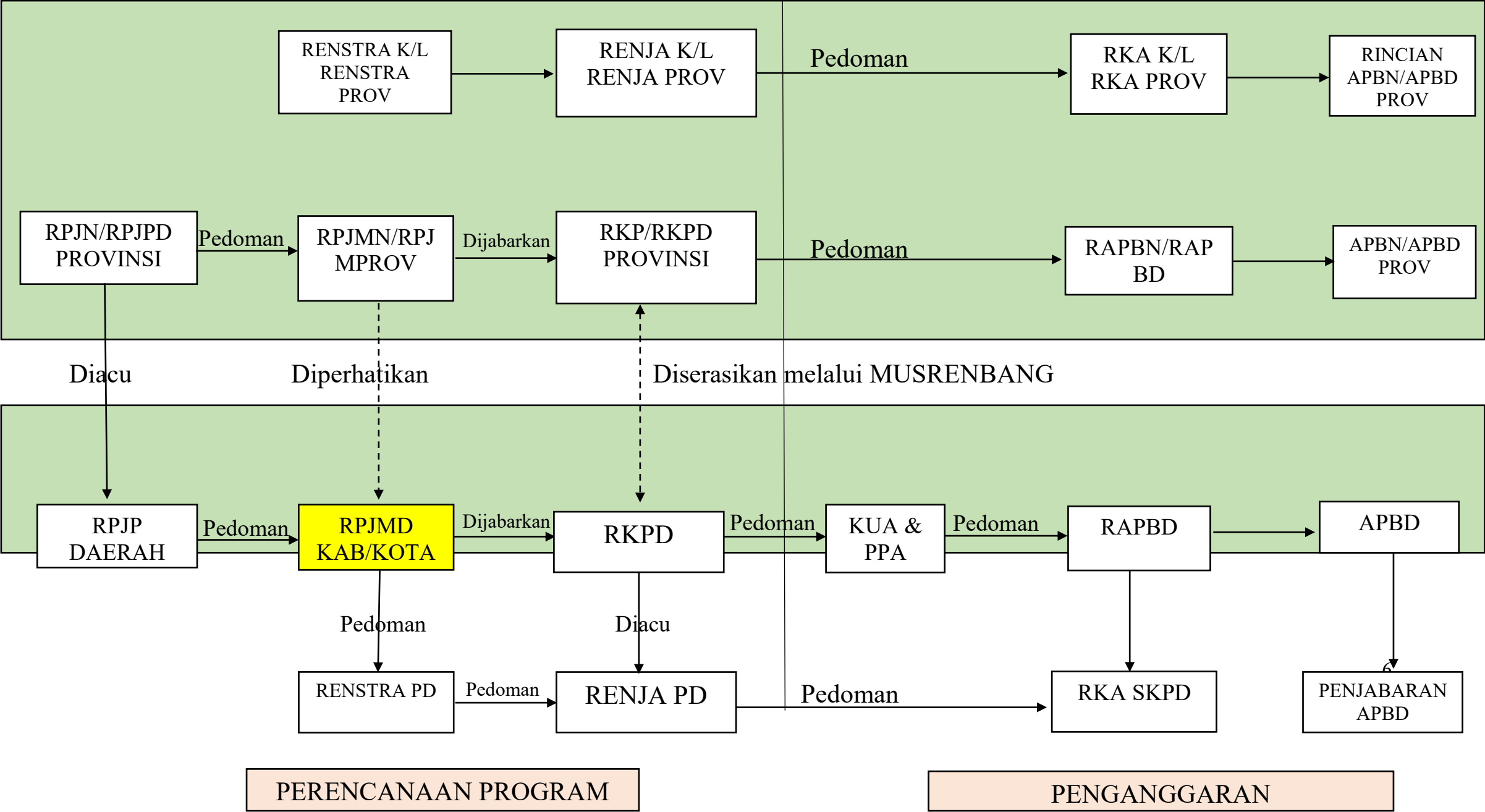
1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Maka substansi, tata cara dan sistematika penulisan dalam penyusunan RENSTRA OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur mengacu kepada Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- BAB I** : ***PENDAHULUAN***; berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan dan Hubungan Renstra OPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.
- BAB II** : ***GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH***; berisi Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumberdaya, Kinerja Pelayanan, Tantangan, Peluang dan Pengembangan Pelayanan serta Permasalahan dan Isu Strategis OPD.
- BAB III** : ***TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN***; berisi Tujuan dan Sasaran Daerah, Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur, Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB IV** : ***PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN***; berisi Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Indikator Kinerja, Target, dan Pagu Indikatif, Target Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), serta Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029.
- BAB V** : ***PENUTUP***; berisi kesimpulan penting dan substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Penunjang Urusan Pemerintahan.

Gambar 1
Keterkaitan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Dokumen Lainnya



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam mengelola keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien, dan transparan, meliputi penyusunan anggaran (APBD), penatausahaan kas dan tagihan daerah, serta manajemen dan inventarisasi aset daerah di wilayah Kutai Timur. Dalam menjalankan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkomitmen memberikan pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 35 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari Kepala, Sekretaris, dan 4 Kepala Bidang. Sekretaris membawahi 1 Sub Bagian dan 2 Jabatan Fungsional dan Kepala Bidang membawahi masing-masing 2 Kepala Sub Bidang.

Secara rinci susunan organisasi BPKAD Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:

I. Tugas Pokok

1. Kepala Badan mempunyai tugas yang meliputi:
 - a. penetapan kebijakan teknis bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - b. sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah,
 - c. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan
 - d. teknis bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,
 - e. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, Aset Daerah, pembinaan penyelenggaraan urusan ke sekretariat badan, dan
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional.
2. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan tugas:
 - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran,
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan,
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Daerah: dan
 - d. pengelolaan urusan ASN
3. Bidang Anggaran menyelenggarakan tugas:
 - a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Anggaran,
 - b. perumusan kebijakan dalam bidang Anggaran,
 - c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Anggaran, dan
 - d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Anggaran.
4. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas:
 - a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di Bidang Perbendaharaan;
 - b. perumusan kebijakan dalam Bidang Perbendaharaan;

- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam Bidang Perbendaharaan; dan
 - d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam Bidang perbendaharaan.
5. Bidang Akuntansi menyelenggarakan tugas:
- a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di Bidang Akuntansi;
 - b. perumusan kebijakan dalam Bidang Akuntansi;
 - c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam Bidang Akuntansi; dan
 - d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam Bidang Akuntansi.
6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan tugas:
- a. penyusunan dan perencanaan program kegiatan di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah:
 - b. perumusan kebijakan dalam Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah:
 - c. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

II. Fungsi

1. Kepala Badan membawahi Sekretaris dan Bidang-bidang dengan fungsi yang meliputi:
- a. membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya melalui Sekretaris Daerah;
 - b. memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan BPKAD;
 - c. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. menyusun, merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menetapkan kebijaksanaan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - f. membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasikan dengan instansi teknis dan organisasi Perangkat Daerah lainnya yang menyangkut bidang tugasnya;
 - g. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - h. mengorganisasikan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - i. mengorganisasikan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - j. mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN dan laporan kinerja instansi pemerintah Badan, melaporkan kepada kepala daerah secara berkala melalui Sekretaris Daerah ke Bagian Administrasi Organisasi;
 - k. merumuskan kegiatan Sekretariat Badan yang meliputi urusan umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Penyusunan Program sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. merumuskan rencana strategis serta kebijakan operasional di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang meliputi urusan Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi, Aset Daerah dan Pengembangan Aset Daerah;
 - m. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok di bidang Keuangan dan Aset Daerah sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati;

- n. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi teknis dan organisasi lain yang menyangkut bidang tanggungjawabnya;
 - o. melaksanakan tugas-tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - p. melaksanakan tugas-tugas sebagai Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah; dan
 - q. melaksanakan tugas-tugas Kedinasan lainnya sesuai dengan arahan Bupati melalui Sekretaris Daerah
2. Sekretaris membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Fungsional Perencana dan Analis Keuangan dan Pusat Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dan acuan kerja;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan program kerja badan pengelola keuangan dan aset daerah;
 - c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan lingkup tugas sekretariat;
 - d. merumuskan bahan pengelolaan dan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian; perencanaan program; dan keuangan Badan pengelola keuangan dan aset;
 - e. memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi dalam lingkungan badan pengelola keuangan dan aset daerah;
 - f. merumuskan bahan pengelolaan dan koordinasi dokumentasi, perpustakaan, arsip dan perlengkapan/perbekalan rumah tangga; serta pembinaan hubungan kemasyarakatan dan urusan keprotokolan Badan pengelola keuangan dan aset Daerah;
 - g. menghimpun, mengelola, dan menyajikan data/informasi berkaitan dengan penyelenggaraan kinerja badan pengelola keuangan dan aset daerah;
 - h. memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten, instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
 - i. mensinkronisasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang-bidang; Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran
 - j. mengkoordinasikan pengumpulan bahan Rencana Kerja Anggaran untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan pengelola keuangan dan aset Daerah;
 - k. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan pengelola keuangan dan aset Daerah;
 - l. mengendalikan kegiatan kesekretariatan dalam rangka mendukung kegiatan Badan pengelola keuangan dan aset Daerah;
 - m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
 - n. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
 - o. melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan; dan
 - p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Bidang Anggaran membawahi Sub Bidang Anggaran I dan Sub Bidang Anggaran II menyelenggarakan fungsi:
- a. Koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Palfon Anggaran Sementara dan Kebijakan Umum Perubahan APBD/Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan;

- b. Koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - d. Penyusunan Peraturan Kepala daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - e. Mengkoordinasikan proses penyusunan anggaran pendapatan;
 - f. Mengkoordinasikan proses penyusunan anggaran belanja daerah;
 - g. Mengkoordinasikan proses penyusunan anggaran pembiayaan;
4. Bidang Perbendaharaan membawahi Sub Bidang Perbendaharaan dan Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. Mengkoordinasikan pengelolaan dan pemindahbukan uang kas daerah;
 - b. Mengkoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
 - c. Mengkoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
 - d. Mengkoordinasikan penempatan uang Daerah dengan membuka Rekening Kas Umum Daerah;
 - e. Mengkoordinasikan pemrosesan, penerbitan, dan pendistribusian lembar Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban gaji dan non gaji, serta penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran;
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga;
 - h. Mengkoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan, dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
 - i. Mengkoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dengan instansi terkait;
 - j. Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
 - k. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerbitan Surat Penyediaan Dana restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan.
5. Bidang Akuntansi membawahi Sub Bidang Penerimaan dan Belanja dan Sub Bidang Laporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. Mengkoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
 - b. Mengkoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - e. Melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

- f. Menyusun tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - g. Melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
 - h. Menyusun analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - i. Menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
 - j. Menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - k. Melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
 - l. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.
6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahi Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. Mengkoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
 - b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - c. Mengkoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - d. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terkait pengelolaan barang milik daerah;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi, dan hukum barang milik daerah;
 - h. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan dan meneliti dokumen terkait penggunaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. Mengkoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
 - j. Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
 - k. Mengkoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - l. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
 - m. Mengkoordinasikan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional

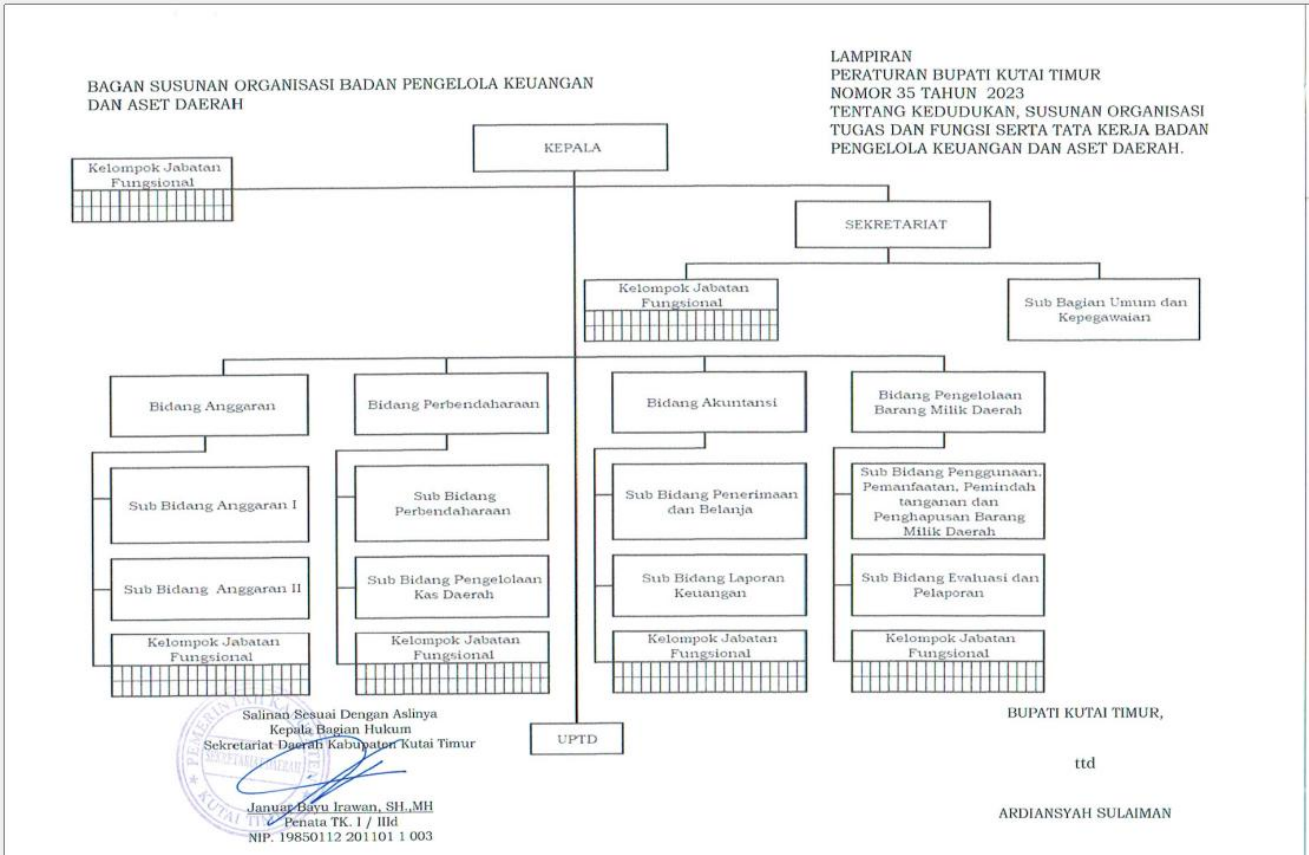
III. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi BPKAD terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Anggaran membawahi
 - 1) Sub Bidang Anggaran I
 - 2) Sub Bidang Anggaran II
- d. Bidang Perbendaharaan membawahi
 - 1) Sub Bidang Perbendaharaan
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

- e. Bidang Akuntansi membawahi
 - 1) Sub Bidang Penerimaan dan Belanja
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahi
 - 1) Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, dan
 - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur



b. Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Kepegawaian

Sampai dengan akhir bulan Desember 2024 Jumlah Pegawai OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur berjumlah 132 Orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 49 orang, Tenaga PPPK Sebanyak 7 Orang, sedangkan Tenaga Non ASN sebanyak 76 orang. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai dapat dilihat pada table – table di bawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

No	Jenis Kepegawaian	Tahun 2024
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	49
2.	Tenaga PPPK	7
3	Non ASN	75
Jumlah		131

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 2.3
Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)
berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

NO	Golongan	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	SD	
1.	IV	0	6	0	0	0	0	0	6
2.	III	0	11	16	2	6	0	0	35
3.	II	0	0	0	0	8	0	0	8
4.	I	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	17	16	2	14	0	0	49

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

NO	Golongan	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	SD	
1.	IX	0	0	6	0	0	0	0	6
2.	VII	0	0	1	0	1	0	0	1
	Jumlah	0	9	7	0	7	0	0	7

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Data Pegawai Non ASN
berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

NO	Golongan	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	SD	
1.	-	0	3	50	1	21	0	0	75
	Jumlah	0	9	7	0	7	0	0	75

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 2.2 Data Aparatur Sipil Negara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diperhitungkan datanya menurut tata kelola administrasi kepegawaian keadaan pegawai di BPKAD Kabupaten Kutai Timur.

Data ASN menurut tingkat pendidikan :

- a. Pendidikan Pasca Sarjana (S2) : 17 Orang
- b. Pendidikan Sarjana (S1) : 22 Orang
- c. Pendidikan Sarjana Muda / Diploma : 3 Orang
- d. Pendidikan SLTA : 14 Orang

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jabatan

NO	NAMA	NIP	ESELON	GOL	PANGKAT	JABATAN
1	Ade Achmad Yulkafilah,S.T., M.M.	19750717 200701 1 014	II.b	IV/a	PEMBINA	KEPALA BADAN
2	H. Aji Salehudin, S.E., M.E.	19780423 200212 1 004	IV.a	IV/a	PEMBINA	SEKRETARIS
3	Abdul Rahman, S.E., M.M.	19680806 199503 1 003	IV.a	IV/a	PEMBINA	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
4	Hj. Darmawati Idrus, S.T., M.M.	19740709 200604 2 011	IV.a	IV/a	PEMBINA	Kepala Bidang Perbendaharaan
5	H. M. Adnan, S.E., M.Si.	19761226 200701 1 010	IV.a	IV/a	PEMBINA	Kepala Bidang Akuntansi
6	Rusdiansyah, S.E., M.Si.	19820507 200604 1 013	IV.a	IV/a	PEMBINA	Kepala Sub. Bidang Penerimaan dan Belanja
7	Eni Widya Astuti, S.E.	19830810 201101 2 005	III/d	III/d	Penata TK. I / III d	Kepala Sub. Bidang Laporan Keuangan
8	Hj. Emmy Farida Aryani, S.E., M.E	19870406 201101 2 007	IV.a	III/d	Penata TK. I / III d	Kepala Sub. Bidang Anggaran II
9	Yanu Tri Sugiarto, S.E., M.A.P.	19830514 200701 1 004	-	III/c	Penata / IIIc	Ka.Sub.Bidang Evaluasi dan Pelaporan
10	Dewi Sawitri, S.Sos., M.E.	19820612 200801 2 028	IV.a	III/c	Penata / IIIc	Ka.Sub.Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD
11	H. Ardaniansyah Darlan, S.T., M.A.P.	19811215 200901 1 005	IV.a	III/c	Penata / IIIc	Kepala Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
12	Ahmad Miraddian, S.E., M.E.	19870316 201503 1 002	-	III/c	Penata / IIIc	Kepala Sub. Bidang Perbendaharaan
13	Fajar Hidayat, S.E.	19870514 201503 1 003	-	III/c	Penata / IIIc	Kepala Sub. Bidang Anggaran I
14	Andra Nurhadi Putra, S.E., M.A.P.	19841013 200701 1 003	-	III/d	Penata TK. I / III d	Perencana Ahli Muda
15	Saidi. S.E.,M.M.	19690815 200701 1 035	-	III/d	Penata / IIIc	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
16	Alfian Noor, S.Pi.	19740305 200701 1 022	-	III/d	Penata TK. I / III d	Penata Layanan Operasional
17	M. Hidayah, S.E., M.Si.	19820819 200112 1 002	-	III/d	Penata TK. I / III d	Penelaah Teknik Kebijakan
18	Erfina, S.E., M.A.P.	19810316 200801 2 027	-	III/d	Penata TK. I / III d	Penelaah Teknik Kebijakan
19	Galuh A. Permata Sari, S.Sos., M.A.P.	19770811 200701 2 015	-	III/d	Penata TK. I / III d	Sub. Bidang Pengelola kas Daerah
20	M. Hajran Hidayatullah, S.E.	19791122 200801 1 011	-	III/c	Penata / IIIc	Penelaah Teknik Kebijakan
21	Deni Atmaja, S.Sos.	19820609 201001 1 027	-	III/c	Penata / IIIc	Penelaah Teknik Kebijakan

22	Piki Dedi Efendi, S.E.	19850326 201001 1 012	-	III/c	Penata / IIIc	Penelaah Teknik Kebijakan
23	Noor Saima Hartini, S.E.	19830421 200701 2 004	-	III/c	Penata / IIIc	Penelaah Teknik Kebijakan
24	Etty Herawati, S.Sos.	19850320 201001 2 004	-	III/c	Penata / IIIc	Penelaah Teknik Kebijakan
25	M. Arif Budiman, S.Sos., M.E.	19900404 201403 1 001	-	III/b	Penata Muda TK. I / III b	Penelaah Teknik Kebijakan
26	Nurul Hidayah, S.E.	19821030 200502 2 003	-	III/b	Penata Muda TK. I / III b	Penelaah Teknik Kebijakan
27	Agus Sembiring,S.E.	19810624 200801 1 015	-	III/b	Penata Muda TK. I / III b	Penelaah Teknik Kebijakan
28	Wira Wahyudi, A.Md.	19790807 200901 1 006	-	III/b	Penata Muda TK. I / III b	Pengolah Data dan Informasi
29	Kamsiah, S.E.	19821021 200801 2 016	-	III/b	Penata Muda TK. I / III b	Penelaah Teknik Kebijakan
30	Ahmad Irfani	19810421 200212 1 005	-	III/b	Penata Muda TK. I / III b	Pengadministrasi Perkantoran
31	Suriansyah	19690711 200212 1 005	-	III/b	Penata Muda TK. I / III b	Pengadministrasi Perkantoran
32	Edi Maryono, S.Sos.	19770110 200901 1 003	-	III/a	Penata Muda III/a	Penelaah Teknik Kebijakan
33	Kris Natalia, S.E.	19841224 201001 2 025	-	III/a	Penata Muda III/a	Penelaah Teknik Kebijakan
34	Ichtiawan Junianto Aziz, SEI.	19850616 202012 1 006	-	III/a	Penata Muda III/a	Penelaah Teknik Kebijakan
35	Rezki Iriani, S.E.	19970324 202012 2 007	-	III/a	Penata Muda III/a	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
36	Ardiansyah	19800205 200212 1 002	-	III/a	Penata Muda III/a	Pengadministrasi Perkantoran
37	Firman Hayadi	19720713 200212 1 008	-	III/a	Penata Muda III/a	Pengadministrasi Perkantoran
38	Belinda Christina, A.Md.	19791214 200601 2 015	-	III/a	Penata Muda III/a	Pengolah Data dan Informasi
39	Denry Ramadhani, S.M.	19840617 201001 1 022	-	III/a	Penata Muda III/a	Pengadministrasi Perkantoran
40	Adriansyah	19800116 200701 1 006	-	III/a	Penata Muda III/a	Pengadministrasi Perkantoran
41	Rukiah	19760411 200801 2 021	-	III/a	Penata Muda III/a	Pengadministrasi Perkantoran
42	Andri Wardhana Nata Wianda	19750918 200801 1 015	-	II/d	Pengatur Tk.I II/d	Pengadministrasi Perkantoran
43	Abdul Jani	19791220 200901 1 004	-	II/d	Pengatur Tk.I II/d	Pengadministrasi Perkantoran
44	Fadli	19800107 200901 1 003	-	II/d	Pengatur Tk.I II/d	Pengadministrasi Perkantoran
45	Ateng Wawan Waliyudin	19750117 201001 1 002	-	II/d	Pengatur Tk.I II/d	Pengadministrasi Perkantoran
46	Endah Lestari	19800925 201001 2 015	-	II/d	Pengatur Tk.I II/d	Pengadministrasi Perkantoran
47	Kusyanti	19870503 200604 2 001	-	II/d	Pengatur Tk.I II/d	Pengadministrasi Perkantoran
48	Ridwan	19721020 200902 1 001	-	II/c	Pengatur II/c	Pengadministrasi Perkantoran
49	Rio Darmawan	19910331 201503 1 003	-	II/c	Pengatur II/c	Pengadministrasi Perkantoran
50	Rexy Adel Samban, S.E.	NPPPK. 19920702 202321 1 022	-	IX	PPPK	Ahli Pertama - Perencana

51	Khiki Utari, S.IP.	NPPPK. 19940629 202321 2 034	-	IX	PPPK	Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Aparatur
52	Nur Fadilah Mas'ud, S.M	NPPPK. 19940930 202421 2 040	-	IX	PPPK	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
53	Annisa Safitri, S.E.	NPPPK. 19990309 202421 2 019	-	IX	PPPK	Arsiparis Ahli Pertama
54	Apriliyanus, S.I.Kom.	NPPPK. 19890422 202421 1 012	-	IX	PPPK	Pranata Humas
55	Agus Wahyuni, S.E.	NPPPK. 19950828 202421 1 015	-	IX	PPPK	Pranata Humas Pranata Humas
56	Agustina Yusup, A.Md.	NPPPK. 19830816 202421 2 008	-	VII	PPPK	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil

Tabel 2.5
Data Tenaga Non ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S.3	0
2	S.2	5
3	S.I	49
4	D.III	1
5	D.II	0
7	SMU / D.I	21
8	SMP	0
9	SD	0
Jumlah		76

Tabel 2.6
Komposisi Tenaga Non ASN
Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan

NO	NAMA	PENDIDIKA N	JABATAN
1	2	3	4
1.	Hari Setiawan, S.E., M.M.	S2	Penata Layanan Operasional
2.	Riyan Hidayat, S.Sos., M.M.	S2	Penata Layanan Operasional
3.	Ade Wisnu Pratama, S.H, M.E.	S2	Penata Layanan Operasional
4.	Atik Dwi Mei F, S.E., M.E.	S2	Penata Layanan Operasional
5.	Fadli, S.Pd., M.M.	S2	Penata Layanan Operasional
6.	Indriani Megawati, S.P.	S1	Penata Layanan Operasional
7.	Muhammad Jajuli, S.Sos.	S1	Penata Layanan Operasional
8.	Erwan Rahmadani, S.Kom.	S1	Penata Layanan Operasional
9.	Ardani, S.E.	S1	Penata Layanan Operasional
10.	Sapriansyah, S.Ak.	S1	Penata Layanan Operasional
11.	Paisal Bakri Rincing, S.E.	S1	Penata Layanan Operasional
12.	Yuliana, S.Ak.	S1	Penata Layanan Operasional
13.	Yuli Trisnawati, S.E.	S1	Penata Layanan Operasional
14.	Nurviani Samseptia Ningtias, S.Ak.	S1	Penata Layanan Operasional
15.	Muhammad Yusran Syah, S.E.	S1	Penata Layanan Operasional

16.	Icha Cristini L, S. Ak.	S1	Penata Layanan Operasional
17.	Fatimah Acing, S. Pd.I.	S1	Penata Layanan Operasional
18.	Novie, SKM.	S1	Penata Layanan Operasional
19.	Wahida, S.E.	S1	Penata Layanan Operasional
20.	Ahmad Rhofi Darmawan, S.E.	S1	Penata Layanan Operasional
21.	Rossy Suriyani S,S.Sos	S1	Penata Layanan Operasional
22.	Siti Salasiah, S.IP.	S1	Penata Layanan Operasional
23.	Aji Fardu Farazela, S.E.	S1	Penata Layanan Operasional
24.	Aswin, S.M.	S1	Penata Layanan Operasional
25.	Rama Dona, S.Sos.	S1	Penata Layanan Operasional
26.	Roni Patinasarani, S.Pt.	S1	Penata Layanan Operasional
27.	Aji Muhammad Farhad Wijaya, S.Sos.	S1	Penata Layanan Operasional
28.	Hadiyanur, S.E.	S1	Penata Layanan Operasional
29.	Nita Sasmita, S.Ak.	S1	Penata Layanan Operasional
30.	Chandra Nursandi, S.H.	S1	Penata Layanan Operasional
31.	Tonie Mahyudin, S.E.	S1	Penata Layanan Operasional
32.	Ari Pitsianto, S.M.	S1	Penata Layanan Operasional
33.	Anggri Wulandari, S.E.	S1	Penata Layanan Operasional
34.	Murni Lestari, S.E.	S1	Penata Layanan Operasional
35.	Murni Lestari, S.E.	S1	Penata Layanan Operasional
36.	Alfani Sofian, S.P.	S1	Penata Layanan Operasional
37.	Hj. Rusmina, S.E.	S1	Penata Layanan Operasional
38.	Raisya Fitri, S.M.	S1	Penata Layanan Operasional
39.	Nurliya, S.Ak.	S1	Penata Layanan Operasional
40.	Novita Rusnawati, S.E.	S1	Penata Layanan Operasional
41.	Arpianor Hidayah, S.IP.	S1	Penata Layanan Operasional
42.	Rea Damayanti, S.Pd.	S1	Penata Layanan Operasional
43.	Tiara Marlita Rosadi, S.T.	S1	Penata Layanan Operasional
44.	Dedy Ismaida, S.M.	S1	Penata Layanan Operasional
45.	Rafsyanjani Rakhmat, S.IP.	S1	Penata Layanan Operasional
46.	Hendra Ardiansyah, S.Sos.	S1	Penata Layanan Operasional
47.	Muhammad, S.Sos.	S1	Penata Layanan Operasional
48.	Tommy Langkis, S.Sos.	S1	Penata Layanan Operasional
49.	Tito Sasono Putro U, S.T.	S1	Penata Layanan Operasional
50.	Dian Haryanto, S.P.	S1	Penata Layanan Operasional
51.	Rabiatul Adawiyah, S.M.	S1	Penata Layanan Operasional
52.	M. Ainul Luthfi, S.Kom.	S1	Penata Layanan Operasional
53.	M. Rijalus Solikhin, A.P.	S1	Penata Layanan Operasional

54.	Yusni Rakhman, S.Kom.	S1	Penata Layanan Operasional
55.	Rizky Irawan Ismar, A.Md.	DIII	Penata Layanan Operasional
56.	Dwi Suhariyanto	SMA	Pengadministrasi Perkantoran
57.	Norhayati	SMA	Pengadministrasi Perkantoran
58.	Abdul Rahman	SMA	Pengadministrasi Perkantoran
59.	Sri Wahyuningsih	SMA	Pengadministrasi Perkantoran
60.	Muhammad Fajri Andika	SMA	Pengadministrasi Perkantoran
61.	Muhammad Riza Saputra	SMA	Pengadministrasi Perkantoran
62.	Syarifah Rahmah	SMA	Pengadministrasi Perkantoran
63.	Zulfiansyah	SMA	Pengadministrasi Perkantoran
64.	Ovi Mafia Winata	SMA	Pengadministrasi Perkantoran
65.	Akhmad Denny Asfiansyah	SMA	Pengadministrasi Perkantoran
66.	Eka Rosiana	SMA	Pengadministrasi Perkantoran
67.	Suriansyah	SMA	Pengadministrasi Perkantoran
68.	Yuliadi Rachman	SMA	Pengadministrasi Perkantoran
69.	Murjani	SMA	Pengadministrasi Perkantoran
70.	Yudi Pratama Putra	SMA	Pengadministrasi Perkantoran
71.	Maryati	SMA	Pengadministrasi Perkantoran
72.	Elis Ernawati	SMA	Pengadministrasi Perkantoran
73.	Armansyah	SMA	Pengadministrasi Perkantoran
74.	Novie Irawan	SMA	Pengadministrasi Perkantoran
75.	Aprilia Yurina Fitri	SMA	Pengadministrasi Perkantoran
76.	Eldi Ferdian Amru	SMA	Pengadministrasi Perkantoran

2. Sarana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Seiring dengan berjalannya waktu dalam pelaksanaan kerja kedinasan, maka pemakaian barang perlengkapan kantor telah banyak yang berada dalam kondisi tidak layak pakai sehingga dianggap perlu dilakukan pemutihan menurut ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku. Berikut adalah komposisi jumlah sarana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, pada tabel 2.6 dibawah ini :

Tabel 2.7
Komposisi Jumlah Perlengkapan

No	Barang Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			B	KB	RB
1	Lap Top	61	61	1	Lap Top
2	Personal Komputer	48	48	2	Personal Komputer
3	Air Conditioning (AC)	11	11	3	Air Conditioning (AC)

4	Alat Kantor Lainnya (Lampu Hias Gantung)	1	1	4	Alat Kantor Lainnya (Lampu Hias Gantung)
5	alat komunikasi satelit lainnya (dst)	4	4	5	alat komunikasi satelit lainnya (dst)
6	Alat Penghancur Kertas	12	12	6	Alat Penghancur Kertas
7	Alat Rumah Tangga Lain-lain	22	22	7	Alat Rumah Tangga Lain-lain
8	Amplifier	2	2	8	Amplifier
9	External/ Portable Hardisk	9	9	9	External/ Portable Hardisk
10	Genset	1	1	10	Genset
11	Handy Talky (HT)	9	9	11	Handy Talky (HT)
12	Kamera Digital	2	2	12	Kamera Digital
13	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	10	10	13	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)
14	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	1	1	14	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)
15	Lemari Arsip Pejabat lainnya	4	4	15	Lemari Arsip Pejabat lainnya
16	Lemari Besi/Metal	2	2	16	Lemari Besi/Metal
17	Loudspeaker	4	4	17	Loudspeaker
18	Mic Conference	9	9	18	Mic Conference
19	Mixer	1	1	19	Mixer
20	Modem	1	1	20	Modem
21	Peralatan Komputer lainnya	2	2	21	Peralatan Komputer lainnya
22	Peralatan Personal Komputer lainnya	16	16	22	Peralatan Personal Komputer lainnya
23	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	1	1	23	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)
24	Printer (Peralatan Personal Komputer)	34	34	24	Printer (Peralatan Personal Komputer)
25	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	16	16	25	Scanner (Peralatan Personal Komputer)
26	Server	1	1	26	Server
27	Sofa	3	3	27	Sofa

28	Tablet PC	30	30	28	Tablet PC
29	Televisi	6	6	29	Televisi
30	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	1	1	30	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)
31	Uninterrupted Power Supply (UPS)	1	1	31	Uninterrupted Power Supply (UPS)
32	Wireles	2	2	32	Wireles

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Output Pelayanan kegiatan dan capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja		Satuan	2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP

Bertolak dari Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan kewenangan dan kebijakan operasional yang secara teknis dilaksanakan berdasarkan kondisi umum pada saat ini. Kondisi umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	N/A	N/A

d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Untuk tercapainya tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur yang dituangkan melalui Program dan kegiatan dilakukan melalui indentifikasi faktor Internal dan Faktor Ekternal melalui analisis SWOT. Analisis SWOT adalah indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Dan Analisa SWOT dibutuhkan untuk menentukan strategi maupun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk lima (5) tahun kedepan.

Kekuatan

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
2. SDM di BPKAD Kutim sudah baik dari segi kuantitas maupun kualitas
3. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi
4. Memiliki infrastruktur sarana pendukung yang memadai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi
5. Seperangkat aturan baik dari Kementerian pusat atau daerah sudah lengkap dan memadai

Kelemahan

1. Sistem Aplikasi yang digunakan untuk menjalankan tupoksi belum memadai
2. SOP belum lengkap dan belum dijalankan sesuai dengan aturan
3. Sosialisasi aturan-aturan kepada OPD belum optimal

Peluang

1. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
2. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kerja dan meningkatkan kualitas SDM;
3. Kehidupan sosial masyarakat yang kondusif;
4. Sertifikasi Akuntansi untuk Aparatur di OPD oleh IAI.

Tantangan

1. Perubahan regulasi dari Kementerian pusat yang dinamis dan cepat
2. Lambatnya penyampaian data-data keuangan dari OPD ke BPKAD
3. Rendahnya pemahaman aturan-aturan keuangan dan aset di OPD

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan pokok terkait keuangan dan aset daerah di Kabupaten Kutai Timur secara garis besar ada 2 hal, yaitu pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal dan pengelolaan barang milik daerah yang belum memadai.

Terkait dengan masalah diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah merumuskan akar masalah yang ditemukan untuk tiap-tiap masalah yang dihadapi. Adapun penjelasan akar masalah untuk setiap masalah dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Permasalahan pelayanan penatausahaan keuangan daerah yang belum optimal mempunyai akar masalah seperti pelayanan penatausahaan keuangan daerah yang belum optimal dan masih rendahnya pemahaman OPD terhadap regulasi penatausahaan keuangan daerah.
- 2) Permasalahan penganggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya bisa diterapkan mempunyai akar masalah yaitu penempatan kode rekening belanja yang masih belum tepat dan masih kurangnya pemahaman di OPD terhadap ketentuan penganggaran belanja daerah
- 3) Permasalahan pelaporan keuangan pemerintah daerah masih belum optimal mempunyai akar masalah masih terdapat OPD yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dan Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang masih kurang
- 4) Permasalahan perencanaan Barang Milik Daerah belum optimal mempunyai akar masalah Belum optimalnya penggunaan Satuan Standar Harga Barang dan Jasa dalam penyusunan anggaran, Penyusunan RKBMD baik pengadaan maupun pemeliharaan belum mengacu pada daftar inventaris barang serta standar sarana dan prasarana sebagai dasar pengalokasian anggaran, dan Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap perencanaan barang milik daerah.
- 5) Permasalahan Penatausahaan BMD yang belum memadai mempunyai akar masalah yaitu Pengumpulan data rekonsiliasi belanja modal dengan aset tetap dalam rangka penyusunan LKPD pada OPD masih lambat, Panatausahaan persediaan di perangkat daerah belum memadai, dan Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap penatausahaan barang milik daerah.
- 6) Permsalahan pengamanan BMD belum memadai mempunyai akar masalah yaitu Masih terdapat barang milik daerah yang dikuasai oleh pihak lain diluar entitas pemerintah daerah, Terdapat aset tanah yang belum bersertifikat, dan masih rendahnya pemahaman OPD terhadap pengamanan barang milik daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur dapat dijelaskan lebih ringkas melalui tabel berikut:

Tabel 2.19
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
Urusan Keuangan			
1	Pengelolaan Keuangan Daerah yang Belum Optimal	Pelayanan Penatausahaan Keuangan Daerah yang belum optimal	Pelayanan Penatausahaan Keuangan Daerah kepada perangkat daerah yang belum optimal
			Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap regulasi penatausahaan keuangan daerah
		Penganggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya bisa diterapkan	Penempatan kode rekening belanja yang masih belum tepat
			Masih kurangnya pemahaman di OPD terhadap ketentuan penganggaran belanja daerah
		Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah masih belum optimal	Masih terdapat OPD yang terlambat menyampaikan laporan keuangan
			Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang masih kurang
2	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum Memadai	Perencanaan Barang Milik Daerah belum optimal	Belum optimalnya penggunaan Satuan Standar Harga Barang dan Jasa dalam penyusunan anggaran
			Penyusunan RKBMD baik pengadaan maupun pemeliharaan belum mengacu pada daftar inventaris barang serta standar sarana dan prasarana sebagai dasar pengalokasian anggaran

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
Urusan Keuangan			
			Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap perencanaan barang milik daerah
		Penatausahaan BMD masih belum memadai	Pengumpulan data rekonsiliasi belanja modal dengan aset tetap dalam rangka penyusunan LKPD pada OPD masih lambat
			Panatausahaan persediaan di perangkat daerah belum memadai
			Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap penatausahaan barang milik daerah
		Pengamanan BMD belum memadai	Masih terdapat barang milik daerah yang dikuasai oleh pihak lain diluar entitas pemerintah daerah
			Terdapat aset tanah yang belum bersertifikat
			Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap pengamanan barang milik daerah

Isu strategis diidentifikasi berdasarkan analisis situasi, misi dan visi kepala daerah terpilih, dan tugas fungsi perangkat daerah, maka isu-isu pengembangan dirumuskan menjawab tantangan yang terkait dengan keuangan dan aset daerah antara lain:

- 1) Regulasi dibidang pengelolaan keuangan dan aset sangat dinamis sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya;
- 2) Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
- 3) Penyusunan RKA-SKPD dan DPA SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen Perencanaan Daerah;
- 4) Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Penjelasan lebih lanjut tentang penentuan isu strategis dalam Renstra periode 2025-2029 disajikan dengan tabel berikut:

Tabel 2.20

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1) Sektor Pertambangan Sektor Pertanian dan Perkebunan Sektor Perikanan	1) Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum optimal	1) Integrasi Pembangunan Berkelanjutan 2) Pengelolaan Aset yang	1) Pendanaan Ekonomi Hijau 2) Dampak Perubahan Iklim	1) Kebijakan Energi dan Iklim 2) Peran Institusi	1) Percepatan Transformasi Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif	1) Regulasi dibidang pengelolaan keuangan dan aset sangat dinamis sehingga

Sektor Industri Pengolahan melalui penciptaan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik melalui efisiensi dan transparansi keuangan	2) Pengelolaan BMD yang belum memadai	Berkelanjutan 3) Perencanaan Anggaran Berwawasan Lingkungan	pada Ekonomi 3) Volatilitas Pasar Keuangan	Keuangan 3) Perubahan Struktur Ekonomi	Ketergantungan Barang Pokok Ibukota Nusantara di Kalimantan Timur 2) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntabel	memerlukan penyesuaian dalam implementasinya 2) Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai 3) Penyusunan RKA-SKPD dan DPA SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen Perencanaan Daerah 4) Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun ke depan, untuk selalu menempatkan posisi organisasi pada kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya dan mampu menanggapi tuntutan lingkungannya sehingga di dalam perkembangan selanjutnya organisasi akan selalu tanggap menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Oleh karena itu visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang merupakan komponen Renstra perlu dirumuskan bersama untuk dijadikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Adapun kerangka perumusan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:



Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025 – 2029 dimana Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur adalah “Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing”

Visi tersebut kemudian dijabarkan kedalam 4 Misi sebagai berikut. Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 :

- 1. Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat, Cerdas serta Berprestasi.
- 2. Transformasi Ekonomi Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Berbasis Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata, Peternakan, Perikanan dan Kelautan
- 3. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Mendukung Konektivitas Antar Wilayah dan Pemerintah yang Berintegritas.
- 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas.
- 5. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terpadu dan Berkesinambungan

Yang berkaitan dengan Tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah pada Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas.

Isu Strategis	:	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Tujuan	:	Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif
Sasaran	:	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas
Indikator	:	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Strategi	:	Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan implementasi dari pernyataan misi ke 4 pemerintah daerah “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas**” yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) Tahun kedepan.

Adapun tujuan rencana strategis yang hendak dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah “**Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas**”.

Gambaran yang ingin dicapai ketika tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas

Dengan tercapainya tujuan ini maka diharapkan dapat terjadi peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan memberikan pelayanan, terwujudnya good governance, dan peningkatan kepercayaan publik.

- 2) Pengelolaan Aset daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Dengan tercapainya tujuan ini maka diharapkan dapat terjadi Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Aset sehingga tidak ada pemborosan atau penggunaan aset yang tidak relevan dan terwujudnya pelayanan publik yang optimal .

Dalam pencapaian tujuan strategis tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur yang telah dirumuskan sebagai berikut:

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahun, semesteran, triwulan atau bulan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran-sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah suatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah merumuskan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	77	78	79	80	81	82	83
		Terwujudnya Pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

3.2. Tabel Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan, Penataan, Pendataan, dan Tata kelola Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan Kapasitas SDM	Peningkatan akses dan kualitas keuangan dan aset daerah	Akselerasi Partisipasi dan Pengawasan Publik	Terwujudnya good governance

3.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan pembangunan guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Secara konseptual, satu strategi dapat dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis.

Sementara itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra. Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Yang hendak dicapai Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas	1. Terwujudnya Pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan	1.1. Peningkatan kualitas perencanaan BMD	1.1.1 Meningkatkan kualitas penyusunan SHS 1.1.2 Meningkatkan kualitas RKBMD 1.1.3 Meningkatkan kapasitas SDM terkait perencanaan BMD
		1.2. Peningkatan Kualitas Penatausahaan BMD	1.2.1 Penyusunan Laporan Penatausahaan BMD tepat waktu 1.2.2 Melaksanakan Inventarisasi BMD 1.2.3 Meningkatkan kualitas rekonsiliasi BMD
		1.3 Pengoptimalan Penggunaan, penilaian, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	1.3.1 Mengoptimalkan proses Penggunaan, penilaian, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
		1.4. Menertibkan data administrasi dan fisik BMD	1.3.1 Penertiban aset daerah yang bermasalah melalui identifikasi kronologi dan koordinasi dengan pengguna barang Lembaga pengawasan Lembaga hukum dan Pemerintah Setempat
	2. Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan	2.1 Peningkatan kualitas dari penyusunan APBD	2.1.1 Optimalisasi capaian target perencanaan anggaran keuangan daerah
		2.2 Pengoptimalan layanan perbendaharaan keuangan daerah	2.2.1 Percepatan peningkatan layanan perbendaharaan keuangan daerah
		2.3 Peningkatan kualitas dari pelaporan keuangan pemerintah daerah	2.3.1 Meningkatkan pembinaan terhadap OPD terkait dengan SAP

BAB IV

**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN**

3.1 Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyusun berbagai program dan kegiatan strategis yang berfokus pada penguatan sektor keuangan dan aset daerah.

Kegiatan atau aktivitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan penjabaran program kerja yang telah dibuat oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau dengan kata lain program kerja merupakan kumpulan dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Aktivitas atau kegiatan tersebut berdimensi waktu tidak lebih dari 1(satu) tahun. Kegiatan yang dilakukan secara tahunan menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berdimensi 5 (lima) tahun.

Dengan pelaksanaan Kegiatan atau aktivitas tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Seluruh rencana kegiatan akan dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Program dan kegiatan yang disusun dapat di lihat pada tabel berikut :

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AWAL RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkelanjutan, Efisien, dan Berkualitas	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		
		Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan			Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan		1. Prosentase Kesalahan Penganggaran 2. Persentase realisasi SP2D terhadap total SPD yang diterbitkan 3. Persentase SKPD yang	1.02.02 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah	

					menyampaikan laporan keuangan tepat waktu 4. Presentase Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD 5. Presentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar 6. Presentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik 7. Presentase Penurunan SILPA		
				Dokumen dan Laporan		5.02.02.2.01 - Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	5.02.02.2.01.0002-Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	5.02.02.2.01.0003-Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
					Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	5.02.02.2.01.0004-Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	5.02.02.2.01.0005-Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	

					Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	5.02.02.2.01.0006-Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	5.02.02.2.01.0007-Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5.02.02.2.01.0008-Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5.02.02.2.01.0013-Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Dokumen dan Laporan		5.02.02.2.02-Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5.02.02.2.02.0001-Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	

				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5.02.02.2.02.0003-Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
				Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	5.02.02.2.02.0004-Penatausahaan Pembiayaan Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5.02.02.2.02.0005-Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
				Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.02.02.2.02.0006-Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
				Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga	5.02.02.2.02.0007-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/	

					(PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5.02.02.2.02.0008-Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5.02.02.2.02.0009-Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5.02.02.2.02.0010-Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5.02.02.2.02.0011- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Dokumen dan Laporan		5.02.02.2.03-Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	5.02.02.2.03.0001-Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	5.02.02.2.03.0002- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	

					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5.02.02.2.03.0003-Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5.02.02.2.03.0004-Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5.02.02.2.03.0005-Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5.02.02.2.03.0006-Penyusunan Tanggapan Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	5.02.02.2.03.0011- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	5.02.02.2.03.0012- Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	
					Laporan	5.02.02.2.04-Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5.02.02.2.04.0008-Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.02.02.2.04.0009- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	

		Terwujudnya Pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan			Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah		1. Persentase OPD yang menyusun RKBMD tepat waktu 2. Persentase OPD yang melaksanakan rekonsiliasi dan melaporkan persediaan 3. Persentase BMD yang ditertibkan terkait aset bergerak dan tidak bergerak 4. Presentase Penambahan Nilai Aset Tetap	5.02.03 - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Dokumen dan Laporan		5.02.03.2.01-Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Harga yang Disusun	5.02.03.2.01.0001-Penyusunan Standar Harga	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0003-Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0005-Penatausahaan Barang Milik Daerah	

			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0006-Inventarisasi Barang Milik Daerah	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0007-Pengamanan Barang Milik Daerah	
			Telaksananya Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka Penyusunan LKPD, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan yang memerlukan Penilaian	5.02.03.2.01.0008-Penilaian Barang Milik Daerah	
			Terselenggaranya Kegiatan Tindak lanjut Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0010-Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0011-Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	5.02.03.2.01.0013-Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

Terlaksananya Program Penunjang			5.02.01-Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
	Dokumen dan Laporan		5.02.01.2.01-Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0001-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.02.01.2.01.0002-Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.02.01.2.01.0004-Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.02.01.2.01.0006-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0007-Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	

					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	5.02.01.2.01.0011- Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Dokumen dan Laporan		5.02.01.2.02-Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.02.01.2.02.0001- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.02.01.2.02.0002- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.02.01.2.02.0003- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.02.01.2.02.0004-Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.02.01.2.02.0007-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
				Dokumen dan Laporan		5.02.01.2.05-Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.02.01.2.05.0002-Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5.02.01.2.05.0009-Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Dokumen dan Laporan		5.02.01.2.06-Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.02.01.2.06.0002-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.02.01.2.06.0004-Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5.02.01.2.06.0008-Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.02.01.2.06.0009-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Unit		5.02.01.2.07-Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5.02.01.2.07.0001-Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

				Laporan		5.02.01.2.08-Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5.02.01.2.08.0002-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.02.01.2.08.0004-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Unit		5.02.01.2.09-Pemeliharaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5.02.01.2.09.0001-Penunjang Urusan Pemerintahan	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5.02.01.2.09.0007-Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.02.01.2.09.0011-Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

TABEL 4.3.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR 2025-2029 BPKAD KAB. KUTAI TIMUR

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN				TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF									
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2024	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
1	2	3	4	5	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas				Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	77	78	1.120.320.925.351	79	688.609.132.271	80	614.035.194.697	81	744.611.913.772	82	892.269.238.075	83	930.392.755.036
	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan			Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	1.120.320.925.351	WTP	688.609.132.271	WTP	614.035.194.697	WTP	744.611.913.772	WTP	892.269.238.075	WTP	930.392.755.036
		5.02.02	Program Pengelolaa n Keuangan Daerah	Persentase realisasi SP2D terhadap total SPD yang diterbitkan	-	-	989.607.166.982	80%	623.789.353.137	83%	556.235.168.767	90%	674.520.511.364	93%	808.278.636.978	97%	842.813.531.840
				Presentase Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	11,98%	22,03%		30,00%		30,00%		30,00%					
				Presentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	75,59%	79,09%		84,37%		90,20%		91,37%		94,87%		96,59%	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN				TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF									
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2024	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
1	2	3	4	5	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Presentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	40%	40%		40%		40%		40%		40%		40%	
				Presentase Penurunan SILPA	-93,57%	-94,07%		-94,57%		-95,07%		-95,57%		-96,07%		-96,57%	
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan rencana anggaran daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.880.496.000	2 Dokumen	6.067.531.985	2 Dokumen	3.587.611.775	2 Dokumen	4.331.873.824	2 Dokumen	5.246.192.231	2 Dokumen	5.470.195.511
		5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	2 Dokumen	1.015.432.000	1 Dokumen	697.793.580	4 Dokumen	688.356.697	4 Dokumen	840.127.421	4 Dokumen	1.006.589.281	4 Dokumen	1.049.568.935
		5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen		-	1 Dokumen	537.120.164		-		-		-		-
		5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	55 Dokumen	110 Dokumen	811.582.500	55 Dokumen	536.026.730	110 Dokumen	563.109.435	110 Dokumen	687.265.308	110 Dokumen	823.439.248	110 Dokumen	858.598.707

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN		TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						2024	TARGET RP	TARGET RP	RP	TARGET RP	RP	TARGET RP	RP	TARGET RP	RP	TARGET RP	RP
1	2	3	4	5	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	55 Dokumen		-	55 Dokumen	420.654.164		-		-		-		-
		5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	55 Dokumen	110 Dokumen	333.876.000	55 Dokumen	556.731.393	110 Dokumen	554.105.998	110 Dokumen	676.276.769	110 Dokumen	810.273.453	110 Dokumen	844.870.754
		5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	55 Dokumen		-	55 Dokumen	434.669.210		-		-		-		-
		5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	4 Dokumen	719.605.500	2 Dokumen	670.909.293	4 Dokumen	649.461.389	4 Dokumen	792.656.371	4 Dokumen	949.712.373	4 Dokumen	990.263.256
		5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		-	2 Dokumen	441.139.756		-		-		-		-

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN		TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2024	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
1	2	3	4	5	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
		5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang		-	250 Orang	1.772.487.695	270 Orang	1.132.578.256	270 Orang	1.335.547.957	270 Orang	1.656.177.875	270 Orang	1.726.893.859
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	2.419.558.110	4 Dokumen	5.612.719.206	4 Dokumen	6.708.250.347	4 Dokumen	7.983.253.539	4 Dokumen	9.328.833.510	4 Dokumen	9.489.189.415
		5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	180 Dokumen	180 Dokumen	337.657.000	180 Dokumen	383.212.688	180 Dokumen	335.344.697	180 Dokumen	409.282.392	180 Dokumen	490.377.123	180 Dokumen	511.315.395
		5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	300 Dokumen	300 Dokumen	250.285.000	300 Dokumen	229.840.751	300 Dokumen	169.307.093	300 Dokumen	206.636.374	300 Dokumen	247.579.062	300 Dokumen	258.150.267

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN				TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF									
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2024	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
1	2	3	4	5	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	189.036.000	4 Dokumen	191.606.344	4 Dokumen	145.214.945	4 Dokumen	177.232.324	4 Dokumen	212.348.928	4 Dokumen	221.415.867
		5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi , Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	20 Dokumen	20 Dokumen	85.150.610	20 Dokumen	95.968.982	20 Dokumen	81.333.470	20 Dokumen	99.266.090	20 Dokumen	118.934.557	20 Dokumen	124.012.861
		5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Dokumen	1 Dokumen	147.972.000	1 Dokumen	127.736.285	1 Dokumen	110.353.019	1 Dokumen	134.683.947	1 Dokumen	161.370.066	1 Dokumen	168.260.294

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN				TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF									
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2024	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
1	2	3	4	5	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penysetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penysetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penysetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penysetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4 Laporan	4 Laporan	330.031.000	4 Laporan	217.765.719	4 Laporan	219.081.074	4 Laporan	267.384.654	4 Laporan	320.363.935	4 Laporan	334.042.932
		5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	638.687.749		-		-		-		-

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN		TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2024	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
1	2	3	4	5	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			i Kas														
		5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	12 Dokumen	347.621.000	12 Dokumen	191.605.705	12 Dokumen	167.621.829	12 Dokumen	204.579.538	12 Dokumen	245.114.688	12 Dokumen	255.580.668
		5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	731.805.500	2 Dokumen	598.389.166	2 Dokumen	536.013.292	2 Dokumen	654.194.935	2 Dokumen	783.816.351	2 Dokumen	817.283.978

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN		TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						2024	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET
1	2	3	4	5	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pertanggung gjawaban Sub Kegiatan														
		5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausah aan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	2.937.905.818	308 Orang	4.943.980.928	308 Orang	5.829.993.285	308 Orang	6.748.928.799	308 Orang	6.799.127.152
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaa n Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	2.877.589.000	4 Laporan	5.698.741.507	4 Laporan	2.196.523.102	4 Laporan	2.658.187.143	4 Laporan	3.158.678.797	4 Laporan	3.267.155.733
		5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaa n Akuntansi Penerimaan dan Pengeluara n Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	250 Laporan	250 Laporan	1.411.246.000	250 Laporan	653.267.778	250 Laporan	859.959.850	250 Laporan	1.049.566.096	250 Laporan	1.257.525.889	250 Laporan	1.311.220.109
		5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan , Belanja, Pembiayaa n,	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	586 Dokumen	586 Dokumen	806.994.000	586 Dokumen	606.753.422	586 Dokumen	430.855.799	586 Dokumen	525.852.037	586 Dokumen	630.043.742	586 Dokumen	656.945.541

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN		TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						2024	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET
1	2	3	4	5	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pendapatan -LO dan Beban														
		5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan		-	12 Laporan	127.737.563		-		-		-		-
		5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	432.738.000	1 Laporan	174.091.927	1 Laporan	238.568.413	1 Laporan	291.168.615	1 Laporan	348.860.422	1 Laporan	363.756.170
		5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	58 Dokumen	58 Dokumen	226.611.000	58 Dokumen	213.002.386	58 Dokumen	118.800.139	58 Dokumen	144.993.511	58 Dokumen	173.722.355	58 Dokumen	181.140.005

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN				TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF									
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						2024	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET
1	2	3	4	5	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pertanggung gjawaban Pelaksanaa n APBD Kabupaten/ Kota														
		5.02.02.2.03.0006	Penyusuna n Tanggapan Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung gjawaban Pelaksanaa n APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	40 Dokumen		-	40 Dokumen	383.212.688		-		-		-		-
		5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung gjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	1000 Orang		-	1000 Orang	2.985.017.347	131 Orang	548.338.899		-	131 Orang	748.526.388		-
		5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaa n Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	25 Lembaga		-	25 Lembaga	555.658.397		-	131 Orang	646.606.883		-	131 Orang	754.093.907

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN		TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2024	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
1	2	3	4	5	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenanga n Pengelolaa n Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	981.429.523.872	4 Laporan	606.410.360.439	4 Laporan	543.742.783.544	4 Laporan	659.547.196.858	4 Laporan	790.544.932.440	4 Laporan	824.586.991.182
		5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaa n dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	962.808.102.072	1 Laporan	593.636.604.186	1 Laporan	532.908.990.377	1 Laporan	640.384.215.950	1 Laporan	768.361.443.129	1 Laporan	802.238.501.668
		5.02.02.2.04.0009	Pengelolaa n Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	18.621.421.800	1 Laporan	12.773.756.253	1 Laporan	10.833.793.167	1 Laporan	19.162.980.908	1 Laporan	22.183.489.311	1 Laporan	22.348.489.514
	Terwujudnya Pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan	5.02.03	Program Pengelolaa n Barang Milik Daerah	Presentase Penambahan Nilai Aset Tetap	30,47%	40,47%	25.140.725.887	50,47%	16.921.599.428	60,47%	15.089.049.960	70,47%	18.297.788.897	80,47%	21.926.259.646	90,47%	22.863.091.374
		5.02.03.2.01	Pengelolaa n Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	25.140.725.887	2 Dokumen	16.921.599.428	2 Dokumen	15.089.049.960	2 Dokumen	18.297.788.897	2 Dokumen	21.926.259.646	2 Dokumen	22.863.091.374

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN				TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF									
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2024	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
1	2	3	4	5	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.015.262.600	1 Dokumen	936.889.417	1 Dokumen	714.395.043	1 Dokumen	777.010.514	1 Dokumen	934.349.596	1 Dokumen	977.575.100
		5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	145.268.000	1 Dokumen	148.764.287	1 Dokumen	82.566.917	1 Dokumen	89.803.762	1 Dokumen	107.988.383	1 Dokumen	112.984.214
		5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	136.404.000	1 Laporan	174.744.328	1 Laporan	2.003.222.985	1 Laporan	2.178.801.960	1 Laporan	2.619.993.803	1 Laporan	2.741.201.702
		5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2.546.720.000	1 Dokumen	1.387.372.342		-		-		-		-
		5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	20.426.159.000	1 Laporan	11.245.987.897	1 Laporan	11.678.689.200	1 Laporan	12.702.305.788	1 Laporan	15.274.432.027	1 Laporan	15.981.067.985
		5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Telaksananya Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka Penyusunan LKPD, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan yang memerlukan Penilaian	1 Laporan	1 Laporan	169.455.000	1 Laporan	177.584.245	50 Laporan	152.030.857	50 Laporan	165.356.095	50 Laporan	198.839.523	50 Laporan	208.038.370
		5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan	Terselenggaranya Kegiatan Tindak lanjut Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan	10 Dokumen	10 Dokumen	451.028.287	10 Dokumen	636.663.587	10 Dokumen	458.144.957	10 Dokumen	498.300.558	10 Dokumen	599.202.863	10 Dokumen	626.923.585

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN				TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF									
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2024	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
1	2	3	4	5	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			nganan, Pemusnaha n, dan Penghapusa n Barang Milik Daerah	Penghapusan Barang Milik Daerah													
		5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusuna n Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	250.429.000	1 Laporan	194.373.156		-		-		-		-
		5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaa n Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			-		2.019.220.169		-	400 Orang	1.886.210.220	400 Orang	2.191.453.453	400 Orang	2.215.300.419
		5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Profesionalisme ASN	75	76	105.573.032.482	77	47.898.179.706	78	42.710.975.970	79	51.793.613.511	80	62.064.341.451	81	64.716.131.822
				Nilai SAKIP	61,60	63,50		65,50		67,50		69,50		71,50		73,50	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN				TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF									
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2024	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
1	2	3	4	5	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5.02.01.2.01 5.02.01.2.01.0001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	932.335.717	2 Dokumen	986.873.258	6 Dokumen	680.888.895	6 Dokumen	799.010.944	6 Dokumen	957.763.561	6 Dokumen	998.032.274
		5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	83.619.000	2 Dokumen	71.051.318		-		-		-		-
		5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	74.328.000	2 Dokumen	91.680.618		-		-		-		-
		5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	74.328.000	7 Laporan	164.349.712	5 Laporan	224.162.447	5 Laporan	263.050.623	5 Laporan	315.315.207	5 Laporan	328.572.486

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN		TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						2024	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET
1	2	3	4	5	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	65.037.000	1 Laporan	228.796.940		-		-		-		-
		5.02.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	551.404.717	7 Dokumen	340.095.839	8 Dokumen	258.716.287	8 Dokumen	303.598.937	8 Dokumen	363.919.920	8 Dokumen	379.220.760
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	90.204.928.833	4 Dokumen	36.349.833.237	4 Dokumen	34.087.460.860	4 Dokumen	41.691.306.349	4 Dokumen	49.974.802.314	4 Dokumen	52.075.969.141
		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang	135 Orang	88.980.656.633	135 Orang	35.614.362.283	135 Orang	33.573.192.312	135 Orang	41.087.821.402	135 Orang	49.251.413.110	135 Orang	51.322.165.382
		5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	764.850.000	1 Dokumen	388.341.715		-		-		-		-
		5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	107.003.000	1 Dokumen	50.799.481	1 Dokumen	285.722.782	1 Dokumen	335.290.576	1 Dokumen	401.908.257	1 Dokumen	418.806.299

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN				TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF									
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2024	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
1	2	3	4	5	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaa n Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	68.016.500	1 Dokumen	84.665.591	1 Dokumen	228.545.766	1 Dokumen	268.194.370	1 Dokumen	321.480.947	1 Dokumen	334.997.460
		5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulan/Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	284.402.700	1 Dokumen	211.664.167		-		-		-		-
		5.02.01.2.05	Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1 Laporan	4.116.211.674	1 Laporan	1.776.225.404	1 Laporan	2.084.368.755	1 Laporan	2.498.504.499	1 Laporan	2.603.552.934
		5.02.01.2.05.0002	Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	-	1 Dokumen	295.455.888		-		-		-		-
		5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	-	980 Orang	3.820.755.786	572 orang	1.776.225.404	572 orang	2.084.368.755	572 orang	2.498.504.499	572 orang	2.603.552.934

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN		TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2024	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
1	2	3	4	5	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5.02.01.2.06	Administra si Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	3.700.902.590	4 Laporan	2.285.286.179	4 Laporan	2.168.323.300	4 Laporan	2.544.488.625	4 Laporan	3.050.043.934	4 Laporan	3.178.281.582
		5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	566.913.885	10 Paket	560.666.460	25 Paket	1.028.687.459	25 Paket	1.207.146.341	25 Paket	1.446.989.913	25 Paket	1.507.827.917
		5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	395.783.705	6 Paket	134.830.900		-		-		-		-
		5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Paket	2 Paket	179.212.000	2 Paket	150.624.272		-		-		-		-
		5.02.01.2.06.0009	Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	2.558.993.000	3 Laporan	1.439.164.547	3 Laporan	1.139.635.841	3 Laporan	1.337.342.284	3 Laporan	1.603.054.020	3 Laporan	1.670.453.665
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera h	1 Laporan	1 Laporan	6.678.480.000	1 Laporan	2.954.199.813	1 Laporan	2.818.979.686	1 Laporan	3.308.022.261	1 Laporan	3.965.281.327	1 Laporan	4.131.999.697
		5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	34 Unit	34 Unit	6.678.480.000	34 Unit	2.954.199.813	34 Unit	2.818.979.686	34 Unit	3.308.022.261	34 Unit	3.965.281.327	34 Unit	4.131.999.697

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN		TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					2024	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
1	2	3	4	5	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dae rah	2 Laporan	2 Laporan	1.802.583.342	2 Laporan	655.447.829	2 Laporan	612.147.527	2 Laporan	718.344.178	2 Laporan	861.069.404	2 Laporan	897.272.658
		5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	432.110.000	12 Laporan	245.954.139	12 Laporan	133.362.501	12 Laporan	156.498.511	12 Laporan	187.592.638	12 Laporan	195.479.882
		5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	1.370.473.342	2 Laporan	409.493.691	2 Laporan	478.785.025	2 Laporan	561.845.667	2 Laporan	673.476.766	2 Laporan	701.792.776
		5.02.01.2.09	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dae rah	3 Laporan	3 Laporan	2.253.802.000	3 Laporan	550.327.715	3 Laporan	566.950.299	3 Laporan	648.072.398	3 Laporan	756.876.413	3 Laporan	831.023.535
		5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	35 Unit	312.060.000	35 Unit	126.998.703	35 Unit	132.667.225	35 Unit	155.682.617	35 Unit	186.614.637	35 Unit	194.460.761
		5.02.01.2.09.0007	Pemelihara an Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			-		-	3 Paket	434.283.074	3 paket	492.389.780	3 Paket	570.261.776	3 Paket	636.562.774

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN		TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						2024	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET
1	2	3	4	5	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	1.941.742.000	10 Unit	423.329.011		-		-		-		-

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
1.	5.02.02 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
2.	5.02.03 - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	

3.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan tersebut.

Pengukuran Indikator Keluaran adalah membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran. Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat

A. Indikator Sasaran :

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AWAL RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai Indeks	77	78	79	80	81	82	83	
2.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AWAL RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Persentase realisasi SP2D terhadap total SPD yang diterbitkan	Persentase	-	-	80	83	90	93	97	
2.	Presentase Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Persentase	11,98	22,03	30	30	30	30	30	
3.	Presentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	75,59	79,09	84,37	90,2	91,37	94,87	96,59	
4.	Presentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	40	40	40	40	40	40	40	
5.	Presentase Penurunan SILPA	Persentase	93,57	94,07	94,57	95,07	95,57	96,07	96,57	
6.	Presentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	30,47	40,47	50,47	60,47	70,47	80,47	90,47	
7.	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai Indeks	75	76	77	78	79	80	81	
8.	Nilai SAKIP	Nilai	61,6	63,5	65,5	67,5	69,5	71,5	73,5	